

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh perkembangan perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Jumlah UMKM mencapai sekitar 99% dari populasi unit usaha, serta menampung lebih dari 92% jumlah tenaga kerja. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,0 %, UMKM menyumbang laju pertumbuhan sekitar 3,0 %, lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan usaha besar. Dari data awal ini menunjukkan betapa strategisnya pengembangan UMKM.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang konsisten dan berkembang. Alasan UMKM lebih diperhatikan dibanding dengan Usaha Besar dikalangan internasional karena UMKM memberikan kontribusi yang berpengaruh bagi perekonomian. Saat ini sekitar 99% pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. UMKM makin tahan banting dan tetap optimistis di tengah krisis. Ketika terjadi krisis global pelaku UMKM tetap bergerak. Pemerintah telah memberikan upaya-upaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM ini. Namun upaya pemberdayaan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dan membawa daya ungkit (*leverage*) yang kuat bagi para pelaku UMKM pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam

ekspor dan perdagangan. Berikut jumlah UMKM di Kota Padang Sidempuan dari Dinas Perdagangan Daerah Kota Padang Sidempuan:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM Di Kota Padang Sidempuan Tahun 2021**

No.	Tempat	Jumlah (Usaha)
1	Batang Ayumi Jae	105
2	Batang Ayumi Julu	30
3	Bincar	10
4	Bonan Dolok	10
5	Kantin	15
6	Kayu Ombun	20
7	Losung Batu	27
8	Payanggar	13
9	Sadabuan	55
10	Tano Bato	15
11	Timbangan	50
12	Tobat	15
13	Wek. I	40
14	Wek. II	27
15	Wek. III	18
16	Wek. IV	20
Jumlah		2.443

*Sumber: Dinas Perdagangan Daerah Kota Sidempuan*

Berdasarkan jumlah UMKM yang terdapat di Kota Padang Sidempuan tahun 2019, jumlah UMKM terbanyak terdapat di Kelurahan Batang Ayumi Jae yang jumlahnya sebanyak 105 usaha. Dan yang paling sedikit adalah di kelurahan Bincar dan Bonan Dolok yaitu masing-masing berjumlah 10 usaha.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, atau biasa disebut UMKM, menjadi salah satu korban paling parah akibat pandemi Covid-19, yang telah berlangsung lebih dari satu tahun dan belum jelas kapan berakhirnya. Survei

Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk *Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha* yang digelar 10-26 Juli 2020, menemukan 42 persen pelaku usaha hanya dapat bertahan selama tiga bulan, yaitu sejak Juli sampai Oktober 2020. Sedangkan 58 persen lainnya masih bisa bertahan di atas 3 bulan. Estimasi ini muncul bila tidak ada perubahan operasional dan intervensi dari pemerintah.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun mengakui rendahnya kemampuan pengusaha bertahan dan memang rapuh, tetapi dia juga mampu untuk mentransformasi dirinya dengan cepat dan adaptif. Menurut Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (Core), Mohammad Faisal, seberapa besar kemampuan UMKM bertahan bergantung pada skala usahanya. Dia menyebut, usaha mikro yang paling rendah kemampuannya bertahan. Selain itu, sektor usaha juga menjadi penentu. UMKM yang bergerak di sektor selain kebutuhan sehari-hari (*basic needs*) boleh jadi tak memiliki kemampuan bertahan yang lama. Survei yang sama menyebut, ada pelbagai bantuan yang dibutuhkan pelaku usaha. Bagi UMK, yang paling dibutuhkan adalah modal usaha yaitu sekitar 69,02 persen. Mereka juga perlu bantuan berupa keringanan tagihan listrik (41,18 persen); relaksasi pembayaran pinjaman (29,98 persen); penundaan pembayaran pajak (15,07 persen); dan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman (17,21 persen).

Bagi UMB, yang paling dibutuhkan adalah keringanan tagihan listrik yakni sebesar 43,53 persen, relaksasi pembayaran pinjaman (40,32 persen), penundaan pembayaran pajak (39,61 persen), bantuan modal usaha (35,07 persen), dan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman (14,44 persen). Pemerintah sebelumnya telah menyediakan insentif bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlahnya pun cukup besar yaitu sekitar Rp123,46 triliun. Dari jumlah tersebut, bantuan diberikan melalui pelbagai program seperti: penempatan dana di perbankan untuk modal kerja, subsidi bunga kredit, bantuan presiden (banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta, dan sebagainya.

Bantuan tersebut juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang Sidempuan. Bantuan yang diberikan merupakan tambahan modal bagi para pengusaha UMKM sebesar Rp 2,4 juta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UMKM. Menurut Gustomi Hamonangan Siregar selaku Kepala Bidang Perdagangan dan UMKM di Kota Padang Sidempuan, total program bantuan presiden untuk UMKM sebanyak 12 juta UMKM se-Indonesia akan menerima bantuan tersebut dan untuk Kota Padang Sidempuan sendiri ia menargetkan 7.205 UMKM dapat tervalidasi di Kementerian.<sup>1</sup> Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan sendiri telah mengajukan sebanyak 2.900 pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mengikuti program dana hibah modal kerja dari pemerintah. Dengan adanya bantuan modal usaha dari Pemerintah tersebut, diharapkan UMKM di kota Padang Sidempuan dapat berkembang yang nantinya menjadi cikal bakal daripada usaha-usaha yang lain serta dapat mendorong perekonomian di kota padang sidempuan yang diduga dipengaruhi oleh modal usaha, tenaga kerja dan pemasaran.

Adapun jumlah pelaku umkm yang menerima bantuan dari presiden dan dibandingkan dengan jumlah pelaku umkm sangat minimal yang mendapatkan bantuan. Jumlah pelaku umkm yang menerima bantuan dari presiden adalah sebesar 317 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah umkm yang ada di kota Padang Sidempuan maka para pelaku umkm hanya sebesar 12% yang menerima bantuan. Sedangkan jika dilihat dari lapangan para pelaku umkm tersebut layak untuk mendapatkan bantuan terlebih lagi setelah pandemi covid19 ini.

Penyerapan tenaga kerja merupakan ukuran berkembangnya UMKM yang secara teori semakin besar jumlah tenaga kerja, semakin berkembang usaha UMKM sehingga dikanakan UMKM naik kelas dari Mikro hingga menengah. Pemasaran juga tidak kalah penting dalam meningkatkan perputaran modal.

---

<sup>1</sup> Khairul Arief, *Pemkot Padangsidempuan usulkan 7.205 pelaku UMKM penerima BPUM* diakses melalui <https://sumut.antaranews.com/berita/412270/pemkot-padangsidempuan-usulkan-7205-pelaku-umkm-penerima-bpum>, pada 17 November 2021

Modal usaha merupakan salah satu faktor yang paling berperan dalam keberlangsungan usaha dan nantinya akan mempengaruhi modal usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia omset merupakan total jumlah penjualan barang atau jasa selama periode penjualan tertentu. Modal yang besar tidak selalu mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>2</sup> Komoditas usaha juga mempengaruhi modal usaha, oleh karena itu modal lebih berpengaruh daripada keuntungan untuk melihat perkembangan suatu usaha.

Menurut penelitian Fitanto pada UKM sepatu di Mojokerto, faktor-faktor yang mempengaruhi modal secara signifikan adalah tenaga kerja, modal dan keunggulan jaringan usaha. Keseluruhan variabel tersebut berkoefisien positif yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif variabel tersebut terhadap modal. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja maka akan semakin tinggi pula modal yang diperoleh. Begitu pula semakin tinggi jumlah modal awal dan keunggulan jaringan usaha yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula modal usaha.<sup>3</sup>

Selanjutnya, Zuliastri melihat dampak perguliran dana simpan pinjam khusus PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan UMKM studi kasus Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian ini menganalisis dampak perguliran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan terhadap perkembangan UMKM yang dilihat berdasarkan indikator modal usaha, keuntungan dan penyerapan tenaga kerja. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, metode regresi linear berganda dengan menggunakan persamaan simultan dan untuk menduga parameter regresi menggunakan *Two-Stage Least Squares*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pinjaman bergulir SPP berhasil meningkatkan pendapatan pelaku usaha dengan meningkatkan modal usaha sebesar 36.05%. Selain modal, keuntungan usaha juga mengalami peningkatan sebesar 36.08%. Pinjaman dana bergulir SPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal

---

<sup>2</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, [Diakses 17 November 2021]. 2016

<sup>3</sup> Bachtiar Fitanto, *Analisis Omset dan Posisi Bersaing Pada Klaster Usaha Kecil Menengah (UKM) Sepatu Kota Mojokerto*, (Journal of Indonesian Applied Economics, 2009)

usaha. Besarnya jumlah pinjaman yang diperoleh UMKM dipengaruhi oleh jumlah guliran dan modal usaha. Semakin besar nilai modal yang diperoleh, maka semakin besar pula keuntungan usaha. Modal usaha selanjutnya berpengaruh nyata terhadap keuntungan yang diperoleh dan keuntungan usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.<sup>4</sup>

Selain itu, menurut Arinda dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Modal Awal Terhadap Modal usaha Mikro di Dramaga, Bogor menjelaskan bahwa Jumlah modal awal berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan modal usaha. Walaupun berpengaruh nyata, tidak selalu modal awal yang besar memberikan modal yang besar pula. Hal ini terlihat bahwa 53% responden yang memiliki usaha mikro modal awalnya lebih besar daripada modal usaha. Sisanya 47% responden modal awal usaha lebih kecil daripada modal usaha.<sup>5</sup>

Modal Usaha diperlukan untuk mengembangkan usaha yang nantinya akan meningkatkan modal, sehingga modal awal harus dapat digunakan secara optimal agar modal terus berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah modal awal berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan modal. Dapat disimpulkan bahwa modal awal yang besar tidak menjamin akan mendapat modal usaha yang besar pula. Hasil regresi linier menunjukkan jumlah modal awal berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan modal usaha. Modal dan modal saling berhubungan dalam suatu usaha.

Definisi dari UMKM sendiri juga dapat dilihat dari aset dan omzet suatu usaha. Usaha mikro merupakan usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet Rp 300 juta per tahun. Usaha kecil memiliki aset antara Rp 50 – 500 juta dengan omzet antara Rp 300 juta – 2,5 miliar per tahun. Sementara usaha menengah mempunyai aset antara Rp 500 juta hingga 10 miliar dan omzet Rp 2,5 – 10 miliar

---

<sup>4</sup> Zuliastri Fikanti, *Dampak Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan UMKM*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB. 2012.

<sup>5</sup> Arinda dan Rengganis Risky, *Analisis Pengaruh Modal Awal Terhadap Omzet Usaha Mikro di Dramaga*, (Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor, 2014).

per tahun. Dari tahun ke tahun, jumlah total unit UMKM di Indonesia maupun PDB-nya terus bertambah. Dari tahun 2010 ke 2017, jumlah PDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Selain dari PDB dan unit usaha, nilai investasi UMKM dari tahun 1999 ke tahun 2013 juga meningkat pesat, tepatnya sebesar 963%. Per 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. Angka-angka ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia.<sup>6</sup>

**Tabel 1.2**

**Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2010 - 2021**

Tahun	Jumlah UMKM	Kontribusi UMKM Terhadap PDB
2010	54,1 Juta	58,1 %
2011	55,2 Juta	57,8 %
2012	56,5 Juta	57,6 %
2013	57,9 Juta	57,5 %
2014	57,9 Juta	56,6 %
2015	59,2 Juta	57,8 %
2016	61,7 Juta	57,2 %
2017	62,9 Juta	57,1 %
2018	64,2 Juta	57,8 %
2019	64,6 Juta	60,3 %
2020	46,3 Juta	37,3 %
2021	64,2 Juta	61,07 %

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) di atas pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau

<sup>6</sup> Sirclo, *Melihat Peran UMKM di Indonesia, Bagaimana Perkembangannya*, diakses dari <https://www.sirclo.com/melihat-peran-umkm-di-indonesia-bagaimana-perkembangannya/> pada tanggal 20 Nopember 2021

senilai Rp8.573,89 triliun. Dengan begitu, UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Di sisi lain, realisasi BPUM juga telah disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing nilai bantuan sebesar Rp1,2 juta. Namun, Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada perkembangan UMKM melalui dana bantuan modal usaha khususnya dari Pemerintah. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni modal usaha, tenaga kerja dan pemasaran. Pada penelitian Arinda menganalisis karakteristik sosial ekonomi pelaku usaha mikro serta pengaruh kuantitas dan sumber modal terhadap modal usaha.<sup>8</sup> Sedangkan Zuliastri menganalisis dampak perguliran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan terhadap perkembangan UMKM yang dilihat berdasarkan indikator modal usaha, keuntungan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta terdapat penambahan variabel yang ditinjau dari penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

Selain itu, penelitian ini juga mengarah pada perspektif ekonomi Islam. Sebagaimana yang sudah dianjurkan dalam Islam, Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama, oleh

---

<sup>7</sup> <https://www.kemenkeu.go.id>, Diakses pada tanggal 20 Nopember 2021.

<sup>8</sup> Arinda dan Rengganis Risky, *Analisis Pengaruh Modal Awal Terhadap Omset Usaha Mikro di Dramaga*, (Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. 2014).

<sup>9</sup> Zuliastri Fikanti, *Dampak Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan UMKM*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB, 2012)

karena itulah di dalam Alqur'an dalil yang menunjukkan tugas kekhalifaan atau pemerintah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagaimana Firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang " (Q.S Al-An'am :165).<sup>10</sup>

Dan juga permasalahan permodalan pada penelitian ini disebabkan bertambahnya modal yang diberikan oleh presiden dengan tujuan untuk mensejahterakan para pelaku umkm yang memiliki kriteria sebagai berikut:

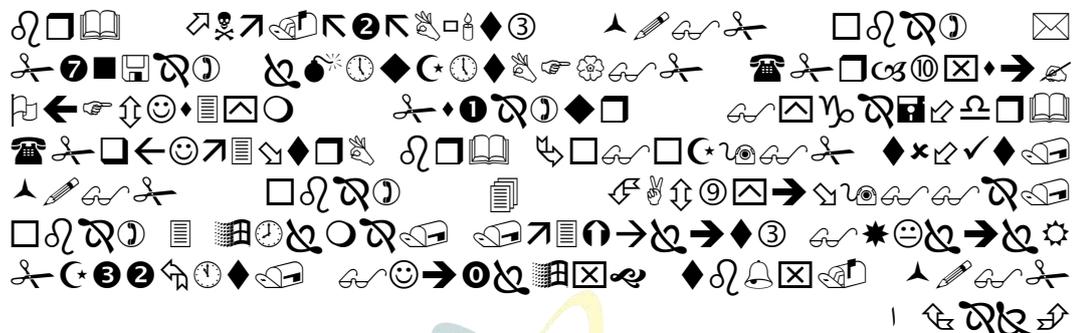
1. Pelaku usaha mikro dan bisa membuktikan surat usulan calon penerima dari pengusul BLT UMKM. 2. Pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
2. Pelaku UMKM tidak menerima Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
3. Pelaku UMKM tidak terdaftar sebagai ASN, baik PNS maupun PPPK.
4. Pelaku UMKM bukan anggota Polri dan prajurit TNI.
5. Pelaku UMKM bukan pegawai di BUMN maupun BUMD.<sup>11</sup>

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya belaku jujur

<sup>10</sup> Q.S Al-An'am :165

<sup>11</sup> Dzikri Abdi Setia, 7 NIK KTP Kriteria Ini Bisa Jadi Penerima Banpres BPUM, Benarkah Pencairan BLT UMKM di Akhir Mei 2022?, diakses dari <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-974424599/7-nik-ktp-kriteria-ini-bisa-jadi-penerima-banpres-bpum-benarkah-pencairan-blt-umkm-di-akhir-mei-2022?page=3>, pada tanggal 17 Agustus 2022.

dan tanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 :



Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya ( Q.S An-Nisa' : 58 ).<sup>12</sup>

Kata amanah dalam ayat di atas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai seorang penyalur bantuan (yang diberi amanah) hendaknya betul-betul menyampaikan kepada yang berhak menerima untuk terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum, program dana bantuan modal usaha Pemerintah bagi pelaku UMKM mempunyai tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaan dana bantuan modal banyak mengalami permasalahan diantaranya menyangkut sasaran, pembagian dana bantuan modal ini juga dinikmati oleh masyarakat kaya sehingga, yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya padahal bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PERAN BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA PADANG SIDEMPUAN.**

<sup>12</sup> Q.S An-Nisa' : 58

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan bantuan presiden usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kota Padang Sidempuan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan presiden usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kota Padang Sidempuan?
3. Bagaimana peran bantuan presiden usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kota Padang Sidempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian, sudah seyogyanya memiliki tujuan dan manfaat. Penelitian ini dilakukan dalam rangka:

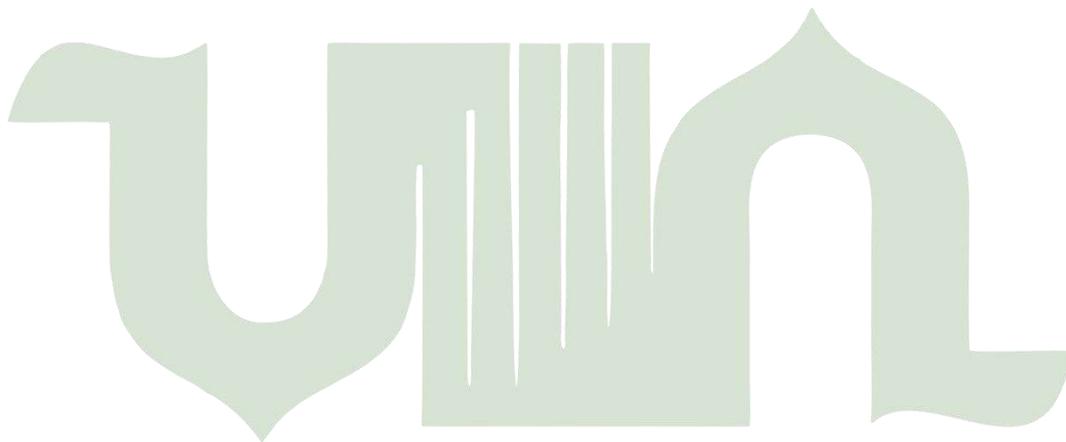
1. Untuk mengetahui proses perencanaan bantuan presiden usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kota Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan presiden usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kota Padang Sidempuan.
3. Untuk mengetahui peran bantuan presiden usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kota Padang Sidempuan.

## **D. Manfaat penelitian**

Selain itu, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang perkembangan UMKM dan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) khususnya di Kota Padang Sidempuan.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro)
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar sebuah studi, review, dan pengembangan yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN